

Jokowi Effect Tanpa Efek

Oleh: Hendra Kurniawan

"SAYA adalah manusia biasa. Saya dus tidak sempurna. Sebagai manusia biasa saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdikan kepada Tuhan, kepada Tanah Air, kepada Bangsa. Itulah *Dedication of Life*-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku, dan menghikmatikan serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat."

Untaian kata ini merupakan penggalan surat Bung Karno, *Dedication of Life*, yang ditulis pada tanggal 10 September 1966. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta pada tanggal 6-8 September 2013, *Dedication of Life* ini dibacakan oleh Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta, yang juga kader PDIP. Banyak yang kemudian menerka bahwa secara simbolik, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP telah memberi isyarat dukungannya pada Jokowi yang saat itu sudah digadang-gadang sebagai calon presiden (capres).

Nama Jokowi mulai dikenal saat masih menjabat sebagai Walikota Solo selama hampir dua periode (2005-2010 dan 2010-2012) dan berhasil menjadikannya sebagai walikota terbaik di dunia. Tahun 2012 Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakil gubernur. Gebrakan Jokowi-Ahok sangat menarik perhatian masyarakat dan semakin melejitkan nama mereka berdua. Masyarakat di daerah lain sampai ada yang berangan-angan memiliki kepala daerah seperti Jokowi-Ahok. Belum lagi peran media massa yang hampir setiap hari memberitakan keduanya. Jokowi-Ahok telah menjadi *media darling* yang selalu dinanti pemberitaannya.

Di samping peran media, strategi *blusukan* yang semakin mendekatkan diri dengan rakyat, pendekatan humanis dalam gaya kepemimpinan, dan kinerja yang tidak mengecewakan membuat Jokowi berhasil meraih elektabilitas tertinggi sejak bulan November 2013. Dari berbagai hasil survei, elektabilitas Jokowi berhasil mengungguli Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Mahfud M.D., dan Hatta Rajasa. Meskipun di awal tahun 2014, banjir yang melanda Jakarta sempat membuat elektabilitas Jokowi turun, namun secara umum elektabilitas Jokowi relatif stabil.

Jumatsore tanggal 14 Maret 2014 menjadi jawaban yang ditunggu bukan saja oleh para simpatisan PDIP maupun pendukung Jokowi

pada Pemilu 2014. Pendeklarasian Jokowi yang dilakukan sebelum pemilu legislatif ini tentu bukan tanpa alasan. Pertimbangan politisnya, pencalonan Jokowi diharapkan mampu meraup suara sebanyak-banyaknya bagi PDIP dalam Pemilu Legislatif.

Banyak yang memprediksi bahwa Jokowi *effect* bakal meningkatkan perolehan suara PDIP secara signifikan. Sejak awal PDIP yakin akan memenangkan Pemilu tahun 2014 ini. Puan Maharani yang mengetuai Badan Pemenangan Pemilu PDIP bahkan telah memasang target perolehan suara sebesar 27 persen. Jokowi sendiri juga optimis suara PDIP di DKI Jakarta akan naik dua kali lipat dibandingkan Pemilu 2009

Fenomena Jokowi telah membuat politik nasional semakin dinamis. Meskipun tampaknya momentum Pemilu 2014 berada di tangan Jokowi, namun kenyataan berkata lain bagi PDIP. Berdasarkan hasil *quick count* yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, dapat dipastikan PDIP menjadi pemenang pemilu legislatif 9 April 2014, meskipun perolehan suara PDIP tidak mencapai angka di atas 20 persen. Dengan demikian PDIP harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung capres-cawapresnya tentu setelah melalui proses tawar-menawar dan berbagai kesepakatan. Jokowi yang mempesona banyak orang memang bagian dari PDIP, namun bukan berarti Jokowi sama

Nama Jokowi mulai dikenal saat masih menjabat sebagai Walikota Solo selama hampir dua periode (2005-2010 dan 2010-2012) dan berhasil menjadikannya sebagai walikota terbaik di dunia. Tahun 2012 Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakil gubernur. Gebrakan Jokowi-Ahok sangat menarik perhatian masyarakat dan semakin melejitkan nama mereka berdua. Masyarakat di daerah lain sampai ada yang berangan-angan memiliki kepala daerah seperti Jokowi-Ahok. Belum lagi peran media massa yang hampir setiap hari memberitakan keduanya. Jokowi-Ahok telah menjadi *media darling* yang selalu dinanti pemberitaannya.

yang lalu dari sebesar 11 persen menjadi 20 persen. Apabila target ini tercapai maka PDIP dapat menduduki kursi mayoritas di legislatif sekaligus akan memuluskan jalan bagi Jokowi melenggang ke istana tanpa harus berkoalisi.

Memang jika tanpa koalisi, PDIP dapat lebih leluasa dalam memilih pasangan yang tepat sebagai cawapres pendamping Jokowi. Akan tetapi di sisi lain, apabila terlalu banyak partai yang berperan sebagai oposisi dapat dipastikan akan menyebabkan pemerintahan tidak stabil. Maka PDIP sendiri telah menyatakan kriteria calon wakil presiden pendamping Jokowi selain figur profesional, tegas, dan memiliki jaringan luas di luar negeri, juga diprioritaskan berasal dari kalangan eksternal PDIP. Artinya tidak menutup kemungkinan bagi PDIP untuk berkoalisi sekalipun berhasil memen-

dengan PDIP. Barangkali benar telah terjadi penggiringan opini: "Jokowi Yes...! PDIP No...!"

Sangat menarik ketika mencoba membandingkan antara fenomena Jokowi *effect* dengan Rhoma Irama *effect*. Keduanya notabene bukan ketua partai namun sama-sama dicalonkan sebagai presiden oleh masing-masing partainya. Berbagai analisis menempatkan Rhoma Irama *effect* lebih terasa pengaruhnya daripada Jokowi *effect*. Pada Pemilu 2009 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat suara 4,94 persen sedangkan PDIP mendapat suara 14,03 persen. Hasil *quick count Kompas* tanggal 10 April 2014, PKB mendapatkan suara 9,17 persen sedangkan PDIP mendapatkan suara 19,17 persen.

Ini berarti PKB mendapat kenaikan suara yang signifikan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan

kan strategi politiknya dalam mengusung Rhoma Irama. Gerindra juga memetik manisnya Prabowo *effect*. Dalam Pemilu tahun ini Gerindra memperoleh kenaikan suara yang signifikan. Dari 4,46 persen suara di tahun 2009, kini menurut hasil *quick count Kompas* tanggal 10 April 2014 Gerindra meraih 11,77 persen suara nasional dan masuk dalam tiga besar.

Rhoma Irama *effect* dan Prabowo *effect* justru lebih berhasil daripada Jokowi *effect*. Sebenarnya ketidakberhasilan PDIP mencapai target perolehan suara 27 persen atau paling tidak tembus 20 persen bukan semata-mata karena gagalnya Jokowi *effect*. Jokowi sendiri mengungkapkan kurang solidnya internal partai, khususnya para caleg dalam memaksimalkan perolehan suaranya, ditambah konsep marketing PDIP yang kurang menjual menjadi faktor penting.

Dalam berbagai iklan politiknya, PDIP memang tampak lebih menonjolkan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani ketimbang sosok Jokowi. Di samping itu, pengaruh kuat Jokowi hanya muncul pada tataran wacana di media. Padahal respek pengguna media, utamanya media sosial di dunia maya, tidak menggambarkan masyarakat di dunia nyata yang jumlahnya jauh lebih banyak. Jokowi *effect* dalam pemilu legislatif memang gagal, namun tentu lain halnya dengan pilpres mendatang. Dapat dipastikan Jokowi akan tetap menjadi sosok yang menggoda.

Dari hasil hitung cepat saat ini, maka dapat disimpulkan akan diperoleh paling tidak tiga poros besar yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra. Ketiga partai ini jauh-jauh hari telah mengumumkan capresnya masing-masing. Akan tetapi melihat hasil pemilu legislatif, dapat dipastikan partai-partai papan atas ini harus berkoalisi dengan partai-partai papan menengah atau papan bawah. Tidak menutup kemungkinan dapat muncul pula poros-poros alternatif, seperti poros koalisi lama yang digagas Partai Demokrat atau poros partai-partai Islam.

Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa politik merupakan seni kemungkinan. Politik sangatlah dinamis sehingga segala hal yang tak terduga sebelumnya bisa saja terjadi. Setiap partai politik di masa sekarang ini mulai sibuk melakukan berbagai perhitungan politik yang benar-benar matang untuk menentukan manuver selanjutnya menjelang pilpres.

Masyarakat tentu berharap keputusan politik apapun yang diambil nantinya tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Koalisi bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan namun sebagai wujud integrasi tekad dan tujuan bersama demi kemashlakhatan bangsa dan negara ***